

Making Change

Making History

**ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BIROKRASI BEBAS**  
**DARI KORUPSI DAN WILAYAH**  
**BIROKRASI BERSIH MELAYANI**  
**STRATEGI PERCEPATAN**  
**REFORMASI**

Drs. Agus Uji Hantara, Ak, ME  
Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat

**DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN**

# TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

**Visi**

**Menjadi  
Pemerintahan  
Kelas Dunia**

**DYNAMIC  
GOVERNANCE**

**2024**

**PERFORMANCE BASED  
BUREAUCRACY**

**2019**

**RULE BASED  
BUREAUCRACY**

**2014**

Perpres No. 81 Th. 2010

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:  
a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

**2010**

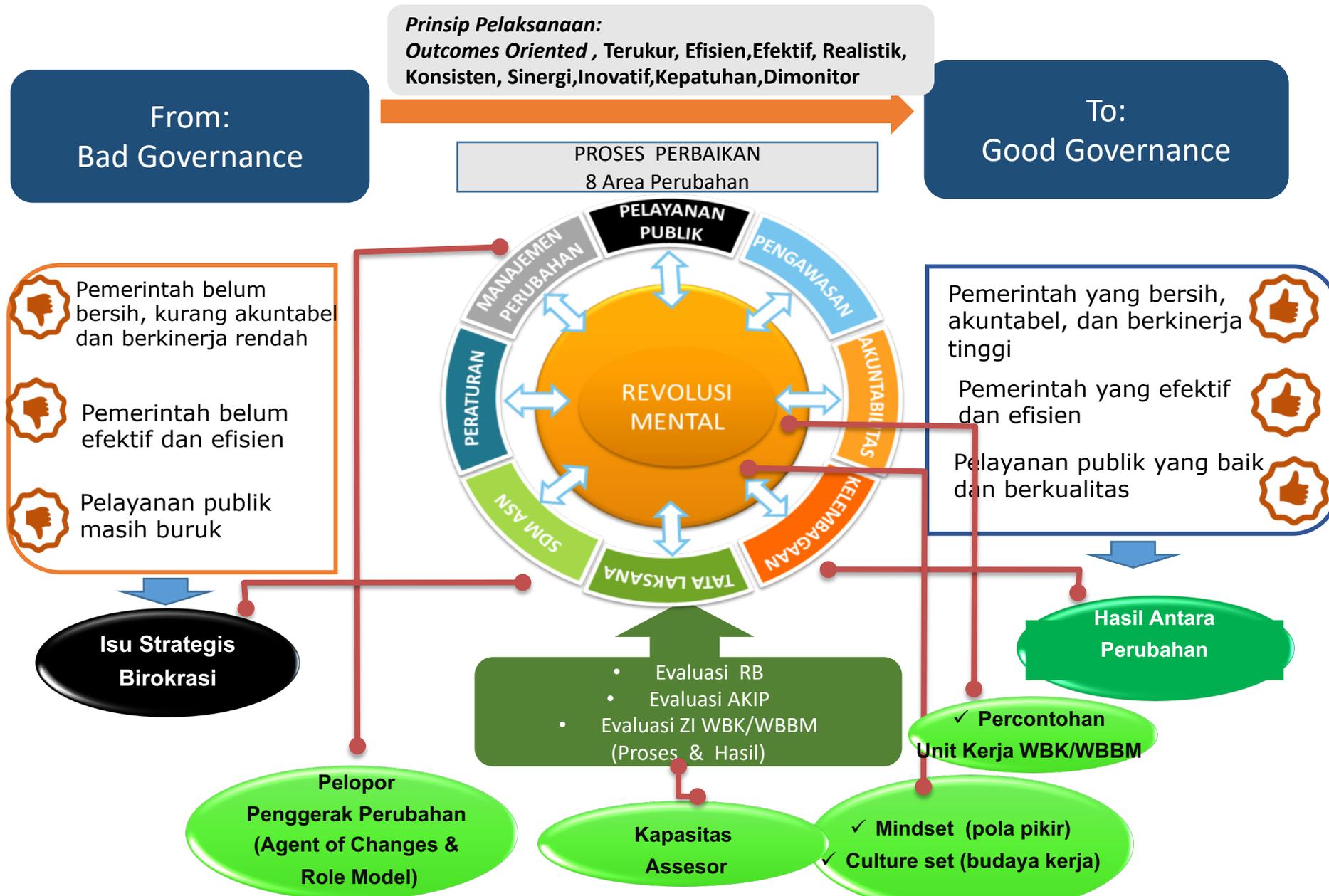
Roadmap 2010-2014

Roadmap 2015-2019

Roadmap 2020-2025

**Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025**

# Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi





# PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



## UNIT PERCONTOHAN

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

- Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia

- Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

- Membangun percontohan (*Role Model*) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

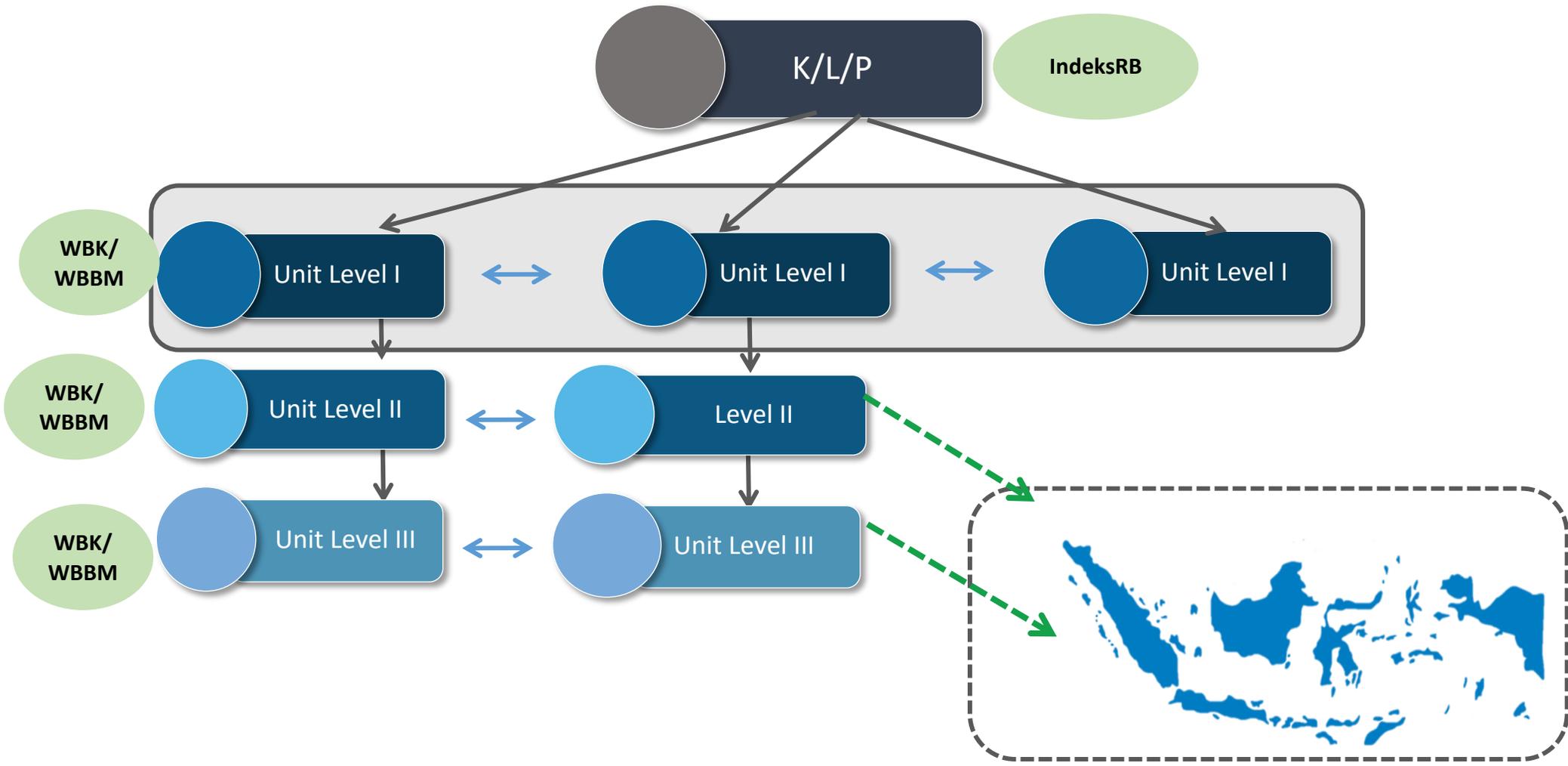


# Ilustrasi RB & ZI WBK/WBBM



REFORMASI BIROKRASI	ZONA INTEGRITAS (Menuju WBK/WBBM)
<p>Instansi Pemerintah (contoh Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah)</p>	<p>Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat, dsb)</p>
<p>Unsur Pengungkit (8 Area)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan</li> <li>2. Tatalaksana</li> <li>3. Manajemen SDM</li> <li>4. Akuntabilitas</li> <li>5. Pengawasan</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> <li>7. Organisasi</li> <li>8. Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>	<p>Unsur Pengungkit (6 Area)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan</li> <li>2. Tatalaksana</li> <li>3. Manajemen SDM</li> <li>4. Akuntabilitas</li> <li>5. Pengawasan</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>
<p>Hasil (3 sasaran)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (IPAK, IO)</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPP)</li> <li>3. Kapasitas dan Akuntabilitas (AKIP,IJ)</li> </ol>	<p>Hasil (2 sasaran)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (IPAK, TLHP)</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPP)</li> </ol>

# Ilustrasi Pembangunan ZI Unit Kerja WBK/WBBM



# Kerangka Logis Pelaksanaan RB

**RB**

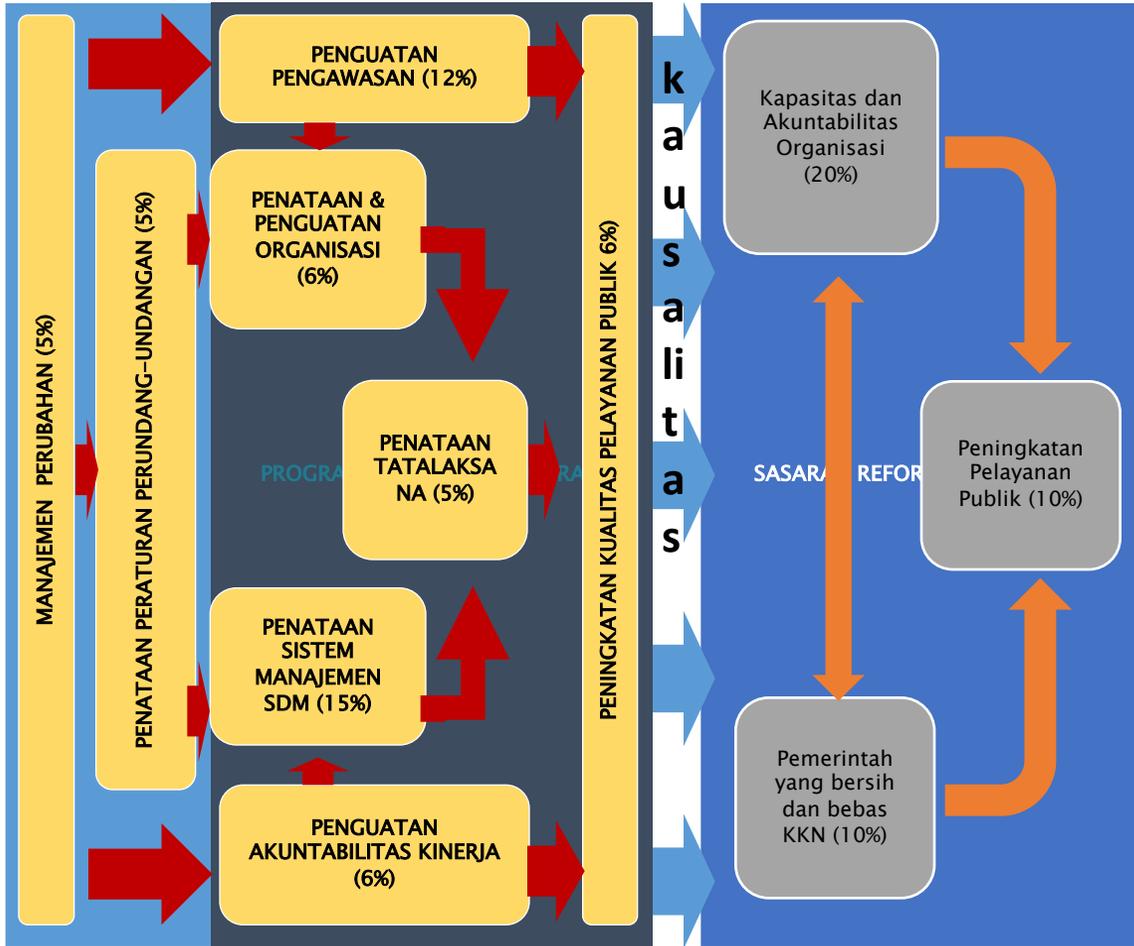
**ZI**

PENGUNGKIT (60%)

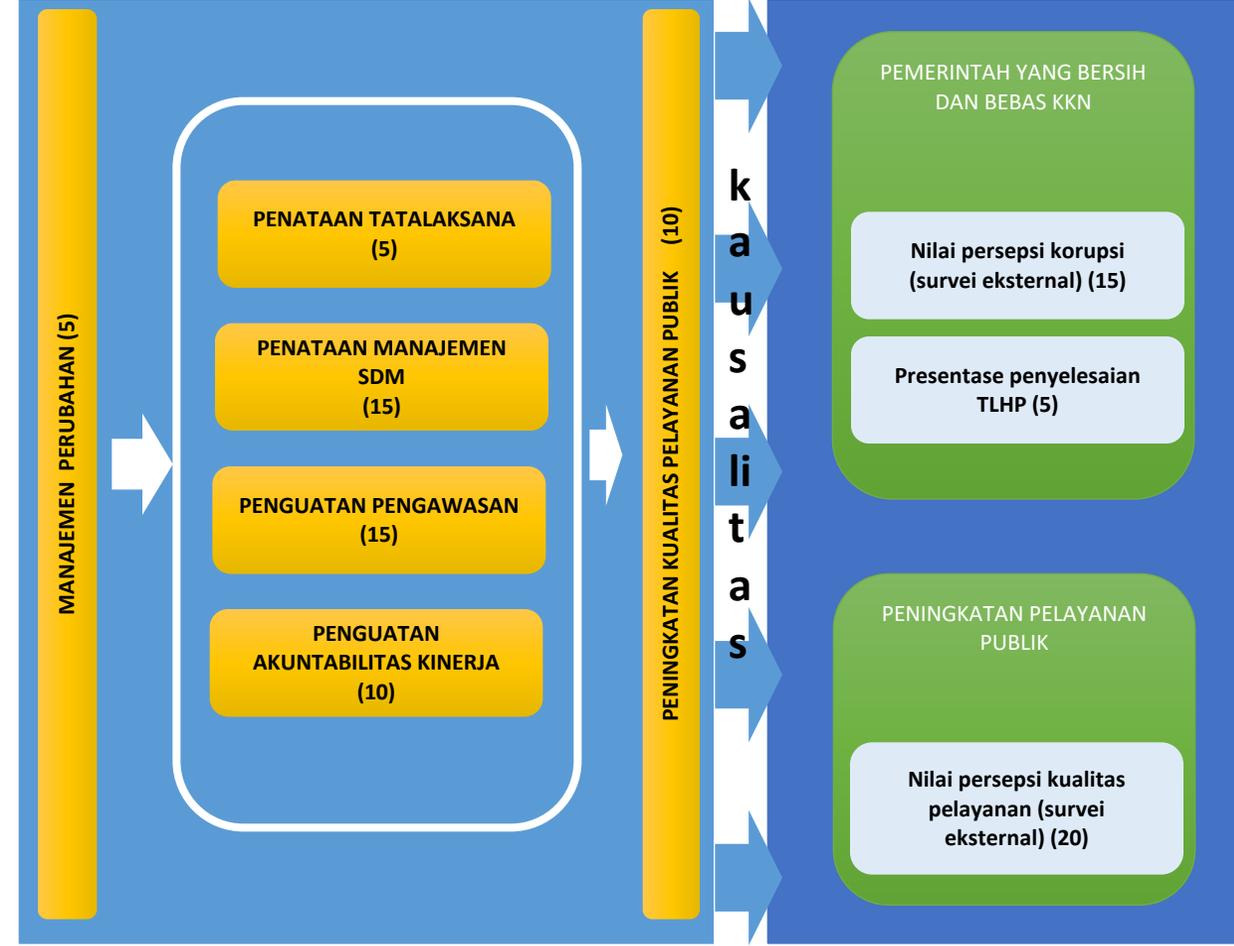
HASIL (40%)

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

# Perkembangan Regulasi Pembangunan ZI WBK/WBBM

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. (**Pengganti Permenpanrb nomor 20 Tahun 2012**)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. (**Pengganti Permenpanrb nomor 60 Tahun 2012**)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (**Pengganti Permenpanrb nomor 52 Tahun 2014**)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor..... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ( Masih Draft )

# STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



**3** FOKUS

**11** AKSI

**1** PERIJINAN & TATA NIAGA

**2** KEUANGAN NEGARA

**3** PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

- Aksi di K/L sebagai PJ
- Aksi di Daerah sebagai PJ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- 2 Perbaiki Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaiki Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak
- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- 11 Perbaiki Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana

AKSI  
09

### PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### PENANGGUNG JAWAB

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Perhubungan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agama
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kejaksaan Agung
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial



#### OUTPUT

- 1 Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (zona integritas) di setiap instansi pemerintah
- 2 Terbitnya MoU komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan Unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI, serta Unit Layanan Pendidikan
- 3 Terbentuknya Unit Pengendalian Integritas di sektor-sektor strategis

## ZONA INTEGRITAS

#### SUB AKSI 2

- 1 Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- 2 Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektor strategis

# RINGKASAN STRANAS PK



TENTANG STRATEGI NASIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI



PERIJINAN & TATA NIAGA



KEUANGAN NEGARA



PENEGAKAN HUKUM &  
REFORMASI BIROKRASI

Aksi di K/L sebagai PJ

Aksi di Daerah sebagai PJ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Tanggung jawab

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apratur dan Pengawasan

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana

PERMENPANRB 10/2019

## UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS



Mandatory  
(Stranas PK)



Kawasan  
Terpadu

- Pelabuhan laut
- Bandara
- *Kawasan ekonomi berikat*



APH

- Kepolisian
- Kejaksaan
- MA
- Lapas



Unit Layanan  
Pemda

- Disdukcapil
- Samsat
- RSUD/Puskesmas
- PTSP/perizinan
- Kecamatan
- *Pendidikan*



ATR/BPN



Mandiri  
(Prioritas K/L/P)

## UNIT-UNIT LAYANAN UTAMA K/LP

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut



Mandiri  
(Prioritas  
K/L/P)



Mandatory  
(Stranas PK)

## SYARAT PENGUSULAN

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

# Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

- 1 Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2 Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
- 3 Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
- 4 Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.
- 5 Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
- 6 Apabila Hasil Penilaian Tim Internal, Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM

# Sasaran Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

(6 area perubahan)

## Penataan Tatalaksana (2)

- ❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.

## Manajemen Perubahan (1)

- ❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- ❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- ❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

## Penataan Sistem Manajemen SDM (3)

- ❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.

## Penguatan Akuntabilitas (5)

- ❑ Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja
- ❑ Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja

## Penguatan Pengawasan (4)

- ❑ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja
- ❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja menuju
- ❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja

## Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya standardisasi pelayanan menjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.

**Indikator  
Area Perubahan Zona  
Integritas  
WBK/WBBM**

Penataan  
Tatalaksana  
(2)

1. SOP Kegiatan Utama
2. E-Office
3. Keterbukaan Informasi Publik

Manajemen  
Perubahan  
(1)

1. Tim Kerja
2. Dokumen Pembangunan Zona Integritas
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja

Peningkatan  
Kualitas  
Pelayanan  
Publik  
(6)

1. Standar Pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat

Penguatan  
Akuntabilitas  
(5)

Penguatan  
Pengawasan  
(4)

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal
3. Pengaduan Masyarakat
4. Wistle Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. LHKPN/LHKASN

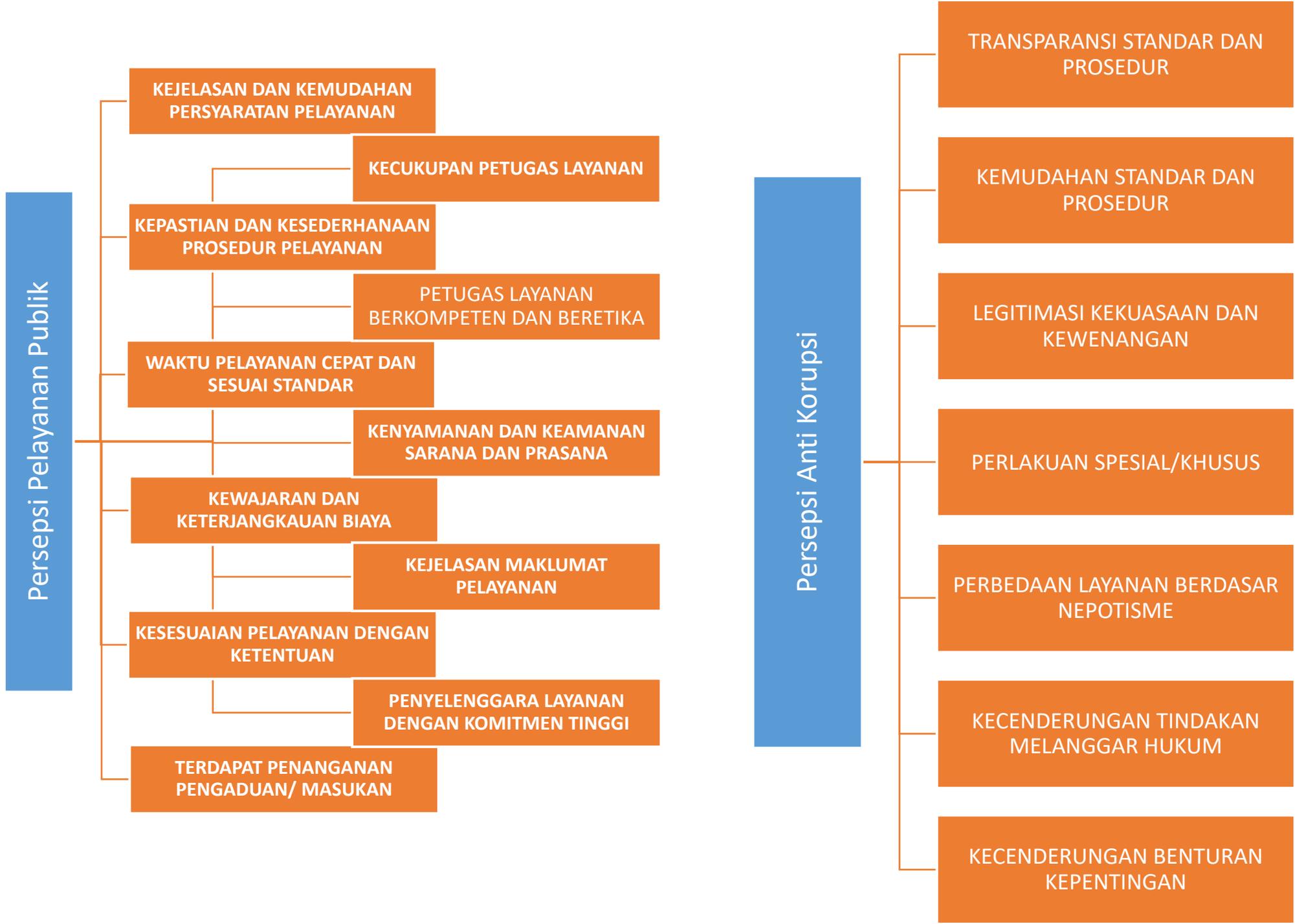
1. Keterlibatan Pimpinan
2. Pengelolaan

Penataan  
Sistem  
Manajemen  
SDM  
(3)

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan
2. Pola Mutasi Internal
3. Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi
4. Penetapan Kerja Individu
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
6. Sistem Informasi Kepegawaian

**PERSEPSI  
DIPENGARUHI  
PANDANGAN  
ATAS SIKAP  
DAN PERILAKU**

**SIKAP DAN  
PERILAKU  
DIPENGARUHI  
OLEH CARA  
PANDANG DAN  
BERFIKIR**





Mandatory  
(Stranas PK)



Mandiri  
(Prioritas K/L)

# Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

PERMENPANRB 10/2019

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18,50	18,88
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5 (survey 3,60)	13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	16 (survey 3,2)	18 (survey 3,60)

## PERBEDAAN WBK & WBBM

1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutan perubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja

# LEMBAR KERJA EVALUASI

	Penilaian	Skor	WBK (min 60 %)	WBBM (min 75 %)
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>48</b>
1	Manajemen Perubahan	5	3	3,75
2	Penataan Tata Laksana	5	3	3,75
3	Penataan SDM	15	9	11,25
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
<b>B</b>	<b>Hasil</b>	<b>40</b>		
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,88
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15	17
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>75</b>	<b>85</b>



Mandatory  
(Stranas PK)

# Penetapan Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM

## ILUSTRASI

SYARAT	WBK	WBBM
Unit kerja	Semua unit kerja memenuhi kriteria predikat WBK	Semua unit kerja memenuhi kriteria WBBM
Skor Integrasi Proses Bisnis	6,5	7,5

Kondisi	Unit Kerja	Integrasi Kawasan	Penetapan
1	Tidak seluruh unit	Tidak ada integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan WBK/WBBM
2	Tidak seluruh unit	Ada integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan WBK/WBBM
3	Seluruh unit	Tidak ada Integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan WBK/WBBM
4	Seluruh unit	Ada integrasi	Memenuhi Kawasan WBK/WBBM

## INTEGRASI PROSES BISNIS



Terdapat peta proses bisnis pelayanan utama kawasan yang menggambarkan integrasi lintas unit kerja pada suatu kawasan;



Terdapat Monev pelaksanaan proses bisnis pelayanan utama yang dilakukan secara berkala;



Implementasi peta proses bisnis pelayanan utama ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP di internal unit kerja;



Terdapat Monev pelaksanaan SOP turunan peta proses bisnis di internal unit kerja yang dilakukan secara berkala;



Terdapat sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja pada suatu kawasan

# Mekanisme Pengusulan Melalui PMPZI

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri PANRB untuk dilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuat surat permohonan reviu pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada TPN.

Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui alamat *website* [www.pmpzi.menpan.go.id](http://www.pmpzi.menpan.go.id).

PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis *web*. PMPZI bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data.

Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI dilakukan **paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya**. Apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan reviu, maka Kementerian PANRB akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan

PMPZI ini digunakan untuk:

TPI untuk melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.

Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuan reviu kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan TPI kepada unit kerja telah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada TPN.

TPN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan Zona Integritas baik pada tingkat K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota maupun profil keseluruhan K/L, Pemda dan profil nasional serta pelaporan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).



**ZONA Integritas** Cari Formulir Keluar Aplikasi

**Daftar Evaluasi**

Pendaftaran Evaluasi

Keluar Aplikasi

### Upload Dokumen

Tahun Anggaran: 2019

Choose File No file chosen Unggah

### Daftar Evaluasi

Show 10 entries Search:

Nama file	Tahun Anggaran	Waktu Unggah	Pilihan
petunjuk_pemakaian_stonline.pdf	2018	Saturday, 09 February 2019	 
tes pdf.pdf	2019	Tuesday, 12 February 2019	 

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Permohonan reuiu pembangunan ZI kepada TPN menggunakan PMP-ZI melalui alamat website [www.pmpzi.menpan.go.id](http://www.pmpzi.menpan.go.id)  
**Paling lambat 31 Mei**

**Tujuan:**  
Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

# Pemantauan Unit Kerja/Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM

Unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM merupakan unit percontohan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga unit tersebut tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPI dan TPN.

TPI

TPN

- Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju WBBM;
  - Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh TPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan dan integritas).
  - Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan Zona Integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknya setiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukan untuk di reviu Menuju predikat WBBM;
  - Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan Zona Integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiap dua tahun sekali; (**contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana terlampir pada lampiran II**)
  - Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.
- 
- Melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM;
  - Melakukan reviu lapangan berkala terhadap unit yang telah mendapatkan WBK/WBBM;
  - Melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM.

# Mekanisme Evaluasi ZI

1

Penilaian Mandiri TPI

2

Pengusulan ke TPN melalui  
[pmpzi.menpan.go.id](http://pmpzi.menpan.go.id) sebelum 31 Mei

3

Survei eksternal online

4

Verifikasi Lapangan  
dan/atau desk

5

Panel Penilaian TPN

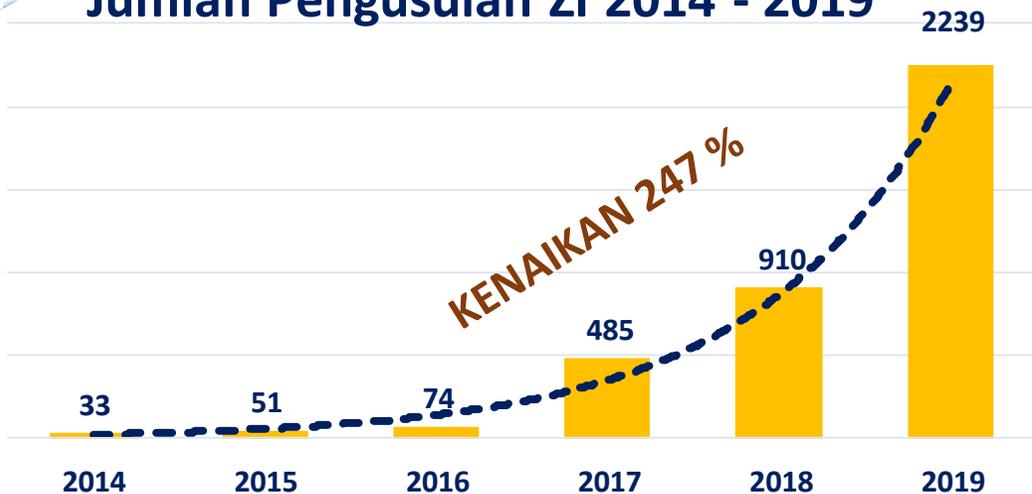
6

Penetapan Predikat



# CAPAIAN PEMBANGUNAN ZI

## Jumlah Pengusulan ZI 2014 - 2019



Saat ini telah terdapat **57** unit kerja **WBBM** dan **778** unit kerja **WBK**. Terdiri atas: Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan; Kantor Imigrasi; Kantor Pertanahan; Rumah Sakit; Kantor Pelayanan Pajak; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan; Lapas; Rutan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perizinan; dan lain-lain

WBBM

## Unit Kerja WBBM 2014 - 2019



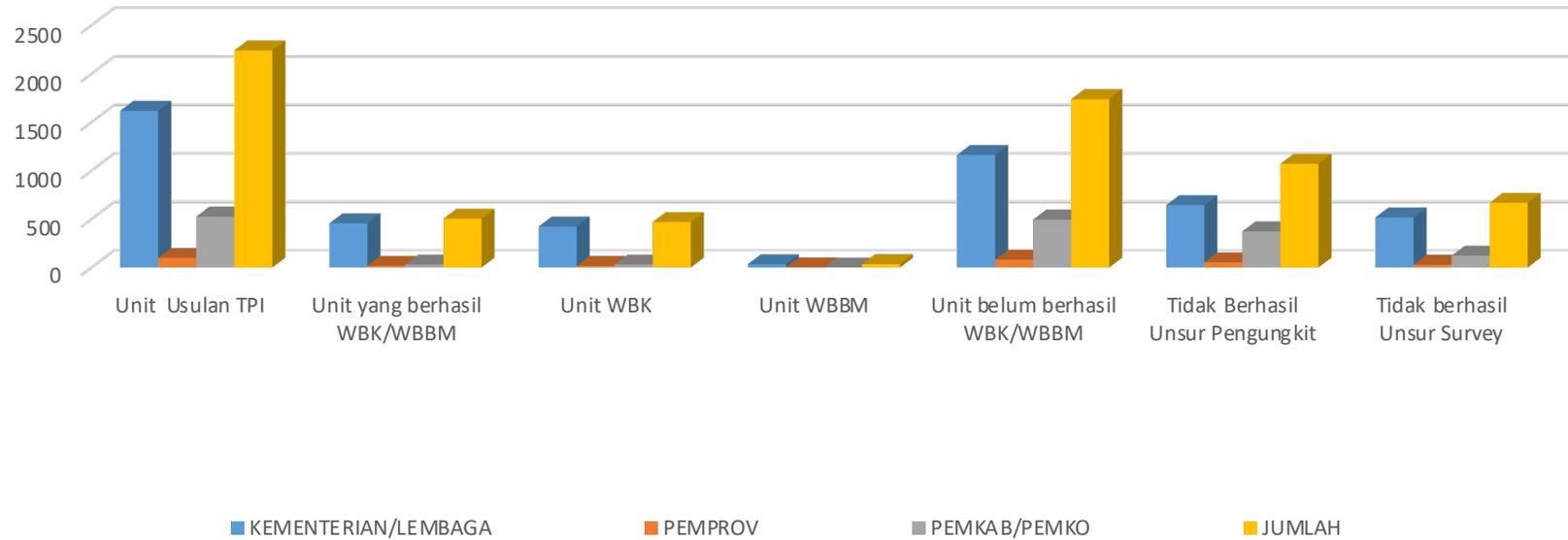
WBK

## Unit Kerja WBK 2014 - 2019



Tahun	PENGUSULAN	WBBM	WBK	IP YANG MEMILIKI UNIT WBK/IP
2014	33 unit	9 unit	12 unit	6 IP
2015	44 unit	1 unit	12 unit	9 IP
2016	137 unit	2 unit	18 unit	13 IP
2017	523 unit	6 unit	76 unit	38 IP
2018	910 unit	5 unit	200 unit	31 IP
2019	2293 unit	34 unit	469 unit	81 IP

PROFIL PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM K/L/PEMDA TAHUN 2019



KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMDA	Unit Usulan TPI	%	Unit yang berhasil WBK/ WBBM	Unit WBK	Unit WBBM	Unit belum berhasil WBK/ WBBM	Unsur Pengungkit	Unsur Survey
KEMENTERIAN/LEMBAGA	66	72,18	455	422	33	1161	644	517
PEMPROV	24	4,38	17	16	1	81	53	28
PEMKAB/PEMKO	139	23,45	31	31	0	494	372	122
JUMLAH	229		503	469	34	1736	1069	667
%	100	100	22,47	20,95	1,52	77,53	61,58	38,42

# Kelemahan Pembangunan ZI pada 6 area pengungkit perubahan dan Survei Eksternal IPP&IPAK

## PENGUNGKIT

- Belum terlihat adanya pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan pembangunan zona integritas dari pimpinan dan pegawai di unit kerja. Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, hanya mengejar nilai/penghargaan;
- Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam Monev pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah;
- Pemahaman dan Keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah;
- Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik, dan pimpinan belum terlihat keterlibatan pimpinan dalam mengawal pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan di lapangan ;
- Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan;
- Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder eksternal/masyarakat belum dilakukan secara efektif ;
- Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholder sehingga upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja tersebut belum mendapat tanggapan positif dari penerima layanan;
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat.

## IPP

- Tidak memenuhi syarat minimal IPP
- Prosedur
- Persyaratan
- Biaya
- Waktu
- Penyelesaian
- Respon

## IPAK

- Tidak memenuhi syarat minimal IPAK
- Masih ada percaloan
- Masih ada pungli

# Beberapa rekomendasi kepada unit kerja WBK/WBBM yang belum berhasil

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja, yaitu dengan adanya keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monev pembangunan ZI, dialog antara pimpinan dengan seluruh pegawai secara berjenjang yang berfokus pada *sharing vision* guna mewujudkan perubahan pola pikir, integritas organisasi, dan budaya kinerja tinggi kepada seluruh tingkatan organisasi;
2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja terkait dengan monev kinerja secara berjenjang dan berkala, sehingga terbangun budaya kinerja;
3. Menyusun peta risiko di setiap unit kerja dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan integritas yang dilakukan oleh pegawai serta meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam melakukan monev terhadap pelaksanaan sistem pengawasan secara rutin dan berkelanjutan;

4. Memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan cara mengefektifkan pengelolaan media dalam menginformasikan perubahan/inovasi yang dilakukan oleh unit kerja. Hal tersebut diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi
5. Melakukan program inovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah dan mempercepat waktu layanan, serta hospitality petugas kepada masyarakat sesuai dengan *core business* unit kerja;
6. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan kepada penerima layanan dengan menggunakan *tools* yang selaras dengan survey eksternal sehingga dapat mengurangi gap nilai survei, serta menindaklanjuti hasil survey tersebut untuk umpan balik perbaikan kualitas dan integritas pelayanan secara berkelanjutan;
7. Membangun dan mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi antar unit kerja yang ada dalam suatu kawasan;
8. Meningkatkan kapasitas Tim Penilai Internal (TPI) terkait dengan substansi Reformasi Birokrasi dan ZI WBK/WBBM serta teknik evaluasinya.

# Strategi Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju WBK/WBBM



## MINDSET / CULTURSET & KOMITMEN

Komitmen nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama



## KEMUDAHAN, KECEPATAN, & TRANSPARANSI PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta, Semangat Hospitallitty untuk kepuasan publik



## PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut



## MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan



## MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telaj dilakukan diketahui oleh masyarakat

# Strategi Kemenpanrb Percepat Pembangunan ZI

1

## Penguatan Komitmen Pimpinan

Pembangunan ZI WBK/WBBM masuk dalam salah satu rencana aksi dalam program strategi nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK)

2

## Penguatan Asistensi dan Monev

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Asistensi
2. Melakukan Monev Perkembangan Pembangunan

3

## Penyempurnaan Kebijakan

Melakukan evaluasi instrumen kebijakan pembangunan dan evaluasi ZI untuk umpan balik perbaikan berkelanjutan

4

## Penguatan TPI

Meningkatkan kualitas hasil Tim Penilai Internal sehingga memperkecil disparitas hasil penilaian antara TPI dan TPN

5

## Pembangunan ZI Secara Kawasan

Pembangunan ZI dilakukan secara bersama sama oleh semua unit kerja yang ada di setiap kawasan strategis

6

## Reward

1. Memberikan penghargaan sebagai pelopor perubahan kepada pimpinan instansi pemerintah yang membangun secara masif dan sistemik serta pimpinan unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM
2. Mendorong Pimpinan Instansi untuk memberikan Reward kepada pimpinan dan jajarannya yang telah berhasil sebagai WBK/WBBM sesuai peraturan yang berlaku

7

## Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan saran perbaikan dan pengawasan terhadap Unit WBK/WBBM melalui pengaduan

8

## Peningkatan kualitas Survei

1. Mendorong pelaksanaan survei internal kepuasan pelayanan dan survei anti korupsi dilakukan secara berkala
2. Perbaikan berkelanjutan atas metode dan pelaksanaan survei eksternal

INTEGRITY  
IS DOING THE  
RIGHT THING.  
EVEN WHEN  
NO ONE IS  
WATCHING.  
C.S. LEWIS

# Perilaku Membangun Budaya

## BUDAYA INTEGRITAS

mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

### Kejujuran

Perilaku yang menunjukkan kebenaran sesuai apa adanya

### Komitmen

Perilaku yang menunjukkan keinginan secara terus menerus menunjukkan kebenaran



### Konsistensi

Perilaku yang menunjukkan kesetiaan terhadap kebenaran

### Etis (Ethical)

Perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku

### Bebas dari kepentingan

Perilaku yang selalu menghindari konflik kepentingan dan pengaruh politik

### Penuh tanggungjawab

Perilaku yang selalu menunjukkan bekerja dengan penuh tanggungjawab

### Adil

Perilaku yang selalu memberikan perlakuan yang sama

### Menghormati

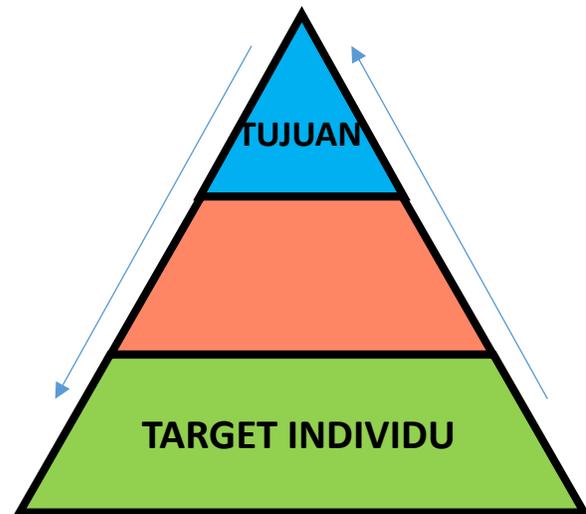
Perilaku yang selalu memberikan penghormatan kepada setiap orang



# BUDAYA KERJA BERORIENTASI HASIL (KINERJA)



Selalu mencari tahu kebutuhan pengguna layanan



Keterkaitan antara tujuan organisasi dan tujuan individu



Keterkaitan antara tunjangan kinerja dengan kinerja organisasi



## BUDAYA KERJA SINERGI

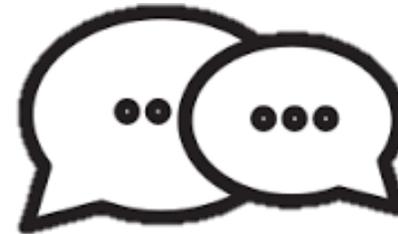
SHARED



Kesadaran akan satu tujuan besar yang akan dicapai dan tidak dapat dilakukan sendiri kecuali bekerjasama dengan instansi lain



Saling menghormati peran, tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dalam mendukung pencapaian tugas/tujuan tertentu



Komunikasi dan koordinasi yang positif untuk mewujudkan tujuan tertentu

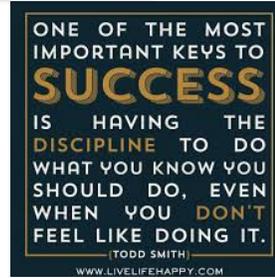


Harmonisasi setiap peran, bertanggungjawab terhadap peran, langkah-langkah dan sekuensinya

# BUDAYA MELAYANI



merespon  
cepat



disiplin



tidak segan  
mengucapkan  
maaf atau terima  
kasih



senyum



tulus



menawarkan solusi



ramah



membantu



mendengar



fokus



sabar,  
mampu  
meredam  
emosi



menghormati



peka



dapat  
dipercaya

# PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

**REFORM** **30%**



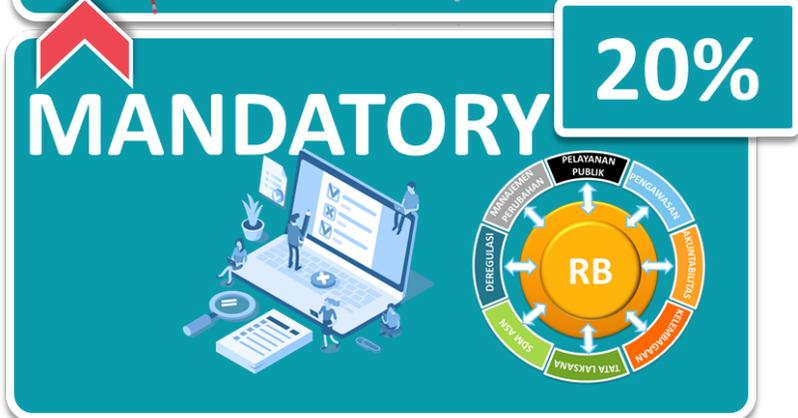
The illustration shows a laptop displaying a bar chart with an upward-trending line. To the right is a circular diagram with 'RB' in the center, surrounded by eight segments: PELAYANAN PUBLIK, PENGAWASAN, KONTROL, KEBERHASILAN, KEBERKAWALAN, TATA LAKSANA, SUMBER, and DEBERGULASI.

**KEWAJIBAN K/L** **10%**



The illustration depicts a group of business professionals in a meeting room, sitting around a table with laptops and documents, engaged in a discussion.

**MANDATORY** **20%**



The illustration shows a laptop with a checklist on the screen, a magnifying glass, and a circular diagram with 'RB' in the center, surrounded by eight segments: PELAYANAN PUBLIK, PENGAWASAN, KONTROL, KEBERHASILAN, KEBERKAWALAN, TATA LAKSANA, SUMBER, and DEBERGULASI.



**HASIL** **40%**

- ❖ SURVEI INTERNAL
- ❖ SURVEI EKSTERNAL
- ❖ DAN LAIN-LAIN



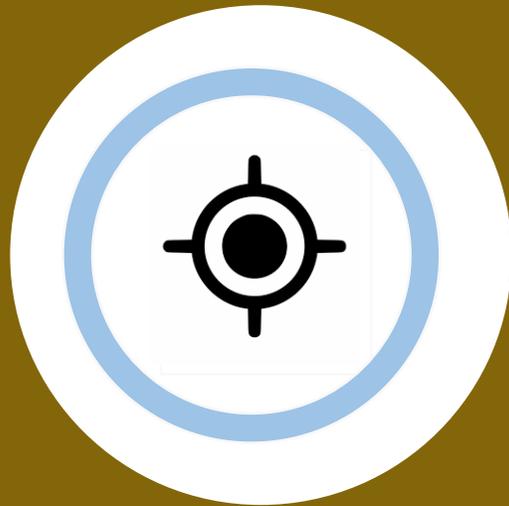
The thumbs up icon is a stylized hand with the thumb pointing up, set against a light blue circular background.

# LKE ZI

BARU

VS

LAMA



## FOKUS

Pertanyaan lebih fokus mengenai hasil



## KOMPONEN

### Pengungkit

- Mandatory (6 Area)
- Reform (Pertanyaan Lebih berorientasi Hasil)

### Hasil



## BOBOT

Pengungkit (60)  
- Mandatory (30)  
- Reform (30)  
Hasil (40)

Making Change  
Making History

**TERIMA KASIH**

**I**NTEGRITAS

**P**ROFESIONAL

**A**KUNTABEL

**P**EDULI

**I**NOVATIF